

**TERM OF REFERENCE**  
**PELATIHAN MANAJEMEN PERTANAHAN DESA**  
**DI LERENG MERAPI, KABUPATEN SLEMAN**



Disusun Oleh :

**Kelompok 6**

- |                         |               |
|-------------------------|---------------|
| 1. Danang Kusumo Wijoyo | NIT. 17263014 |
| 2. Lamijo               | NIT. 17263027 |
| 3. Rangga Pragara       | NIT. 17263038 |

**Dosen Pengampu :**

**ARISTIONO NUGROHO, A. Ptnh., M. Si.**

**NIP. 19620801 198403 1 006**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN**  
**SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL**  
**YOGYAKARTA - 2019**

# **TERM OF REFERENCE**

## **PELATIHAN MANAJEMEN PERTANAHAN DESA DI LERENG MERAPI, KABUPATEN SLEMAN**

### **A. Latar Belakang**

#### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
- h. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

#### **2. *Land and Social Mapping***

##### **a. *Land Mapping***

Terdapat 6 Dusun di 2 Desa (Desa Umbulharjo dan Desa Kepuharjo) yang dipilih sebagai obyek pelatihan manajemen pertanahan kali ini, yang seluruhnya berada pada Lereng Gunung Merapi, diantaranya:

- 1.)Dusun Pangukrejo(Desa Umbulharjo)

Dusun Pangukrejo berada di lereng tengah bagian atas dari Gunung Merapi dengan batas-batas wilayah yakni; di sebelah Utara dengan Dusun Pelemsari; di sebelah Barat dengan Taman Nasional; di sebelah Selatan dengan Dusun Gondang; dan di sebelah Timur dengan Dusun Petung dan Dusun Kaliadem. Penggunaan tanah di dusun ini didominasi oleh permukiman, dimana selain digunakan untuk tempat tinggal, wilayah ini juga dimanfaatkan untuk pondok wisata.

Secara ekonomi masyarakat Dusun Pangukrejo dikenal memiliki karakter responsif menjawab tantangan. Karakter ini nampak pada ketangguhan masyarakat, yang tercermin pada kondisi ekonomi sebelum dan sesudah erupsi Gunung Merapi.

Setelah terjadinya erupsi Gunung Merapi tahun 2010, dimana sebelumnya mata pencaharian warga didominasi oleh peternakan sapi perah, kini beberapa anggota masyarakat beralih profesi dengan mengembangkan wisata Volcano Tour dengan menggunakan jeep dan motor

Kondisi sosial yang dikembangkan di dusun ini berkaitan dengan siaga bencana, sehingga masyarakat dusun punya kesiapan apabila sewaktu-waktu terjadi erupsi Gunung Merapi, misalnya dalam hal melakukan evakuasi.

## 2.) Dusun Pelemsari (Desa Umbulharjo)

Wilayah Dusun Pelemsari berada di antara 2 aliran sungai, yaitu Kali Opak di bagian Timur dan Kali Kuning di bagian Barat, dengan posisi membentang dari utara ke selatan di lereng Gunung Merapi. Dusun Pelemsari merupakan wilayah dengan topografi bergelombang sampai berbukit.

Secara ekonomi masyarakat Dusun Pelemsari dikenal memiliki karakter optimal memanfaatkan potensi. Salah satu contohnya yakni dengan beternak sapi perah di kandang sapi kelompok yang berada di Huntap (Hunian tetap), sebagian masyarakat lain juga ada yang menekuni profesi bidang jasa pariwisata. Adapun secara sosial

masyarakat Dusun Pelemsari dikenal memiliki karakter tradisional perdesaan.

### 3.) Dusun Petung(Desa Kepuharjo)

Dusun Petung merupakan salah satu wilayah perdesaan di Lereng Merapi, yang dibentuk oleh penggunaan tanah uniky yang didominasi areal pertanian yang dikelilingi hutan di sekitarnya. Bidang-bidang tanah dimanfaatkan untuk menanam sengon, mindi, mahoni, akasia, cengkeh, pisang, ketela, kopi, hingga rumput gajah.

Secara ekonomi, masyarakat Dusun Petung dikenal memiliki karakter fokus pada pemanfaatan potensi. Karakter ini dibangun melalui kondisi ekonomi yang bertumpu pada keberhasilan pertanian dan peternakan. Pertanian berkontribusi pada kondisi ekonomi, melalui berbagai tanaman komersial yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat. Sementara itu, peternakan berkontribusi pada kondisi ekonomi, melalui sapi perah yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat. Bertumpu pada keberhasilan pertanian dan peternakan inilah, selanjutnya masyarakat mengembangkan pariwisata.

Adapun secara sosial, masyarakat Dusun Petung dikenal memiliki karakter tradisional aktif. Karakter ini dibangun melalui aktivasi segenap potensi masyarakat dalam menggerakkan kehidupan (ekonomi, sosial, dan budaya) dalam lingkup tradisional.

### 4.) Dusun Kaliadem(Desa Kepuharjo)

Masyarakat Dusun Kaliadem secara ekonomi dikenal memiliki karakter variatif membangun usaha. Karakter ini dibangun dengan memanfaatkan situasi yang berubah setelah terjadinya erupsi Gunung Merapi. Sebagian besar masyarakat Dusun Kaliadem mempunyai keahlian andalan berupa berternak sapi perah, kambing, ayam dan bertani. Keahlian ini sesuai dengan kondisi alam di wilayah dusun, yang cocok ditanami pakan ternak, seperti rumput kalanjana, rumput gajah, tebon, dan lain-lain.

Setelah erupsi Gunung Merapi tahun 2010, masyarakat Dusun Kaliadem tinggal di Huntap Pagerjulang, yang kondisinya tidak jauh berbeda dengan wilayah Dusun Kaliadem. Secara sosial masyarakat Dusun Kaliadem dikenal memiliki karakter tradisional religius. Karakter ini dibangun melalui semangat dan ikhtiar masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sosio-religius, di mana karena sebagian besar masyarakat beragama Islam maka yang dibutuhkan adalah masjid dan kegiatannya.

#### 5.) Dusun Jambu (Desa Kepuharjo)

Dusun Jambu memiliki aksesibilitas baik, mudah dijangkau, dan terhubung dengan daerah-daerah lain di sekitarnya oleh jalur transportasi jalan raya. Dusun ini berada pada lereng tengah Gunung Merapi bagian atas, yang berada pada ketinggian antara 850 m sampai dengan 975 m di atas permukaan laut, dengan bentuk permukaan tanah bergelombang. Wilayah Dusun Jambu berbatasan dengan Sungai Gendol di sebelah Timur, di sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Kaliadem, di sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Petung, dan di sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Kopeng.

Secara ekonomi masyarakat Dusun Jambu dikenal memiliki karakter energik dalam berusaha. Karakter ini dibangun melalui ikhtiar yang terus menerus, yang diperlihatkan masyarakat ketika mengatasi dampak erupsi Gunung Merapi. Kegiatan ekonomi masyarakat Dusun Jambu didominasi oleh pertanian, yang meliputi usaha peternakan sapi perah dan usaha pertanian tanah kering yang berupa tegalan dan kebun campuran, selain itu kini masyarakat Dusun Jambu juga menekuni penambangan bahan galian C.

Secara sosial, masyarakat Dusun Jambu memiliki karakter tradisional dinamis. Karakter ini dibangun melalui berbagai kesepakatan sosial yang berlaku di masyarakat, yang bertujuan merespon dinamika ekologi Gunung Merapi. Salah satu kesepakatan yang berhasil dibangun oleh masyarakat adalah kesepakatan dalam penentuan batas pemilikan tanah, seperti saat menentukan kembali batas-batas bidang tanahnya

dengan melihat tanda-tanda alam yang masih nampak, walaupun material vulkanik yang berupa pasir dan batu menutup tanah dan batas-batasnya, beberapa hari setelah terjadinya erupsi tahun 2010 lalu.

#### 6.) Dusun Kopeng(Desa Kepuharjo)

Dusun Kopeng berada di lereng selatan Gunung Merapi, yang wilayahnya relatif subur, sehingga penggunaan dan pemanfaatan tanah di dusun ini didominasi oleh pertanian. Pasca erupsi Gunung Merapi masyarakat memanfaatkan tanah yang dimilikinya untuk menanam tanaman keras, seperti sengon dan tanaman-tanaman tegalan.

Secara ekonomi, masyarakat Dusun Kopeng dikenal memiliki karakter adaptif memanfaatkan potensi. Masyarakat Dusun ini memiliki keahlian membuat batako, berternak sapi perah, bertani, memelihara ikan di kolam, dan jasa pariwisata.

#### ***b. Social Mapping***

Kemandirian masyarakat Lereng Merapi yang lekat dengan kondisi alam, ekonomi, social, dan budaya, memiliki nuansa sosio-ekonomi dan sosio-ekologi. Aristiono Nugroho, dkk. (2014:166) menjelaskan, bahwa gairah sosio-ekonomi dan sosio-ekologi yang dijalani masyarakat melalui berbagai strategi livelihood, membutuhkan inisiatif masyarakat yang tepat ukuran (tidak berlebihan dan tidak berkekurangan). Inisiatif berlebihan akan mengakibatkan terjadinya mal-adaptasi (adaptasi keliru), sebaliknya inisiatif yang berkekurangan menghasilkan situasi *ruthlessness* (tidak peduli). Sementara itu, sikap inisiatif masyarakat yang tepat ukurannya, akan memperlihatkan ketegaran masyarakat, terutama ketika menghadapi tantangan dan hambatan yang menghalangi kesejahteraannya.

Inisiatif yang tepat telah diupayakan oleh masyarakat Lereng Merapi, mereka berupaya merespon bencana secara proporsional, tanpa menyalahkan pihak manapun. Inisiatif ini diperlihatkan oleh masyarakat Lereng Merapi dalam bentuk yang memang nyata, yaitu ketegaran

mereka ketika menghadapi tantangan dan hambatan yang menghalangi kesejahteraannya. Ketegaran yang diperlihatkan oleh masyarakat, merupakan bukti atas keberdayaan yang ada pada dirinya, serta adanya kemandirian yang menjadi bingkainya.

Dengan demikian kemandirian masyarakat di Lereng Merapi beriringan dengan keberdayaan, terutama hasil pemberdayaan (*empowerment*) yang dilakukan oleh dan untuk masyarakat. Pemberdayaan ini pada salah satu sisinya juga menysasar kemiskinan, melalui berbagai upaya peningkatan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, ikhtiar ini juga dikenali sebagai upaya pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*). Masyarakat Lereng Merapi dapat terbebas dari kemiskinan, dan hidup layak sesuai dengan kebutuhan hidupnya, karena adanya pemberdayaan dan keberdayaan. Hal ini disebabkan beberapa tokoh masyarakat telah menggalakkan peluang (*promoting opportunity*), dan memfasilitasi pemberdayaan (*facilitating empowerment*), serta meningkatkan jaminan sosial (*enhancing security*). Upaya-upaya semacam ini dalam perspektif World Bank (2001) disebut Strategi Trisula (*Three-pronged Strategy*).

### **3. Dasar Pemikiran**

Dampak dan akibat dari erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 lalu mengundang simpati banyak pihak dan menguatkan itikad baik pemerintah, salah satunya dari BPN RI melalui jajaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dengan menyelenggarakan konsolidasi tanah. Penunjukan lokasi kegiatan sertifikasi konsolidasi tanah melalui Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 09/KEP-34.400/I/2014 Tentang Penunjukan Lokasi Kegiatan Sertifikasi Konsolidasi Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 yaitu Desa Kepuharjo dan

Desa Umbulharjo sebagai lokasi konsolidasi tanah; (1) Dusun Pangukrejo, Desa Umbulharjo; (2) Dusun Pelemsari, Desa Umbulharjo; (3) Dusun Petung, Desa Kepuharjo; (4) Dusun Kaliadem, Desa Kepuharjo; (5) Dusun Jambu, Desa Kepuharjo; dan (6) Dusun Kopeng, Desa Kepuharjo. Dusun-dusun tersebut berada di wilayah KRB (Kawasan Rawan Bencana) III yang memiliki ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 6 Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Merapi.

Ketentuan ini menjadi dasar perhatian dalam pelaksanaan konsolidasi tanah, sehingga pasca kegiatan ini maka penggunaan tanah yang ada akan sesuai dengan peraturan tersebut di atas. Seperti yang diungkapkan David Mitchell (2011:69) bahwa manajemen pertanahan sangat penting selama fase awal pemulihan.

Pada fase ini diperlukan manajemen pertanahan, yakni: Pertama, memperhitungkan secara detail issue pertanahan yang berkaitan dengan penghidupan (*livelihood*) masyarakat, terutama yang berkaitan dengan tempat hunian sementara (*shelter*). Kedua, melakukan pemetaan atas tanah yang bebas bencana dan yang berisiko terkena bencana. Kegiatan ini menimbulkan optimisme dalam penanggulangan bencana, karena para pelaksana penanggulangan bencana (BNPB dan BPBD) dapat mengetahui sejak dini wilayah yang berpotensi mengalami bencana, sehingga memudahkan dalam menyusun dan membangun kesiap-siagaan. Ketiga, melakukan tindakan nyata dalam menekan atau mengurangi spekulasi dan perampasan tanah di lokasi yang terkena atau terdampak bencana. Kegiatan ini menimbulkan optimisme dalam penanggulangan bencana, karena menjunjung tinggi prinsip perlindungan dan pencegahan atas terjadinya tindak kejahatan pertanahan yang menimpa korban bencana. Keempat, melakukan koordinasi yang efektif antara lembaga pemerintah dengan lembaga kemanusiaan, dan antara lembaga pertanahan dengan lembaga yang mengelola manajemen kedaruratan. Tidak ada satu instansi pun yang mampu bertindak menanggulangi



bencana sendiri, sehingga diperlukan sinergi antar instansi (termasuk pertanahan).

Pasca erupsi Gunung Merapi tahun 2010, telah dilakukan konsolidasi tanah oleh pemerintah di dusun-dusun yang ada di wilayah Desa Umbulharjo dan Desa Kepuharjo. Walaupun kegiatan konsolidasi tanah telah dilaksanakan yang akhirnya berujung pada pembagian sertipikat, namun ini merupakan awal bagi masyarakat setempat untuk menata kehidupannya kembali.

Maka dari itu, dirasa perlu untuk melakukan pelatihan manajemen pertanahan desa di daerah lereng merapi untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan masyarakat di wilayah tersebut mengenai pertanahan sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dalam mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan.

#### **4. Peluang Keberhasilan**

Peluang keberhasilan pelaksanaan kegiatan pelatihan manajemen pertanahan desa di Lereng Merapi ini kami rasa sangat besar. Karena masyarakat di Lereng Merapi memiliki semangat yang tinggi, sehingga dapat memberikan keuntungan diantaranya sebagai berikut:

- a. membuka peluang partisipasi dan motivasi masyarakat dalam menambah dan memperdalam wawasan tentang pertanahan;
- b. dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat;
- c. dapat mewujudkan tatanan kehidupan yang harmonis;
- d. membuat masyarakat lebih mengerti akan kegiatan pelaksanaan pendaftaran tanah; serta
- e. dapat mencegah para spekulan maupun para mafia tanah yang dapat merebut tanah mereka yang kurang memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman akan pendaftaran tanah. Hal tersebut bisa saja terjadi mengingat peluang usaha yang ada di daerahnya mengalami perkembangan pesat, sehingga membuat para mafia tanah tersebut

mencari peluang untuk mengambil keuntungan dari ketidakpahaman masyarakat akan pentingnya manajemen pertanahan yang baik.

## **B. Tujuan Kegiatan**

Adapun yang menjadi tujuan pelaksanaan pelatihan manajemen pertanahan desa di Lereng Merapi, secara umum adalah agar masyarakat mengetahui pentingnya kegiatan pelaksanaan pendaftaran tanah maupun hal lainnya yang berkaitan tentang pertanahan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Adapun tujuan dari kegiatan ini secara lebih terperinci adalah sebagai berikut:

1. Menumbuhkan kesadaran warga desa di Lereng Merapi mengenai pentingnya kegiatan yang berkaitan tentang pertanahan yang akan dilaksanakan;
2. Masyarakat lebih mengetahui mengenai informasi yang terdapat di desa baik dari segi potensi sumber daya alam yang terdapat di Lereng Merapi itu sendiri maupun dari segi pemanfaatannya;
3. Mewujudkan inventarisasi fisik dan yuridis yang efisien dan efektif; serta
4. Mewujudkan masyarakat yang mampu memahami, mengetahui, dan memperoleh informasi melalui kegiatan inventarisasi data yuridis, yang berupa pengarsipan warkah (dokumen yang berkaitan dengan hak atas tanah) dan inventarisasi riwayat tanah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

## **C. Output (Hasil Kegiatan)**

Harapannya yakni dapat terwujud masyarakat Desa di Lereng Merapi dengan adanya pelatihan ini pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai pertanahan bertambah. Menjadikan masyarakat lebih menyadari akan pentingnya aspek pertanahan sehingga peran aktif masyarakat diharapkan bisa meningkat, dan informasi pertanahan yang diperoleh masyarakat di lereng merapi lebih aktual. Kegiatan ini juga dapat meningkatkan pemerintah desa dalam hal pembangunan desa. Hasil kegiatan bagi pemerintah ialah dapat

tercapai suatu keadilan dan kesejahteraan khususnya bagi masyarakat Desa Umbulharjo dan Kepuharjo secara umum. Selain itu, juga mendorong terciptanya tertib administrasi desa, dimana masyarakat juga sadar membantu pihak desa dalam melaksanakan administrasi yang baik. Jadi, harapannya, apabila terjadi suatu konflik di kemudian hari, maka dapat dicarikan solusi dengan menyajikan data dari desa.

#### **D. Outcome (Dampak Kegiatan)**

##### **1. Dampak Sosial**

Dampak sosial yang timbul pada masyarakat desa di Lereng Merapi yakni diharapkan dapat terjalin komunikasi yang baik antar masyarakat, baik itu warga masyarakat itu sendiri maupun perangkat desa. Selain itu, adanya kehidupan yang lebih adil dan bermartabat yang kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sehingga tidak ada kesenjangan sosial antar masyarakat. Kemudian dapat terwujudnya masyarakat yang harmonis karena masyarakat mampu mengatasi masalah-masalah yang timbul mengenai pertanahan. Serta dapat lebih mengerti arti penting tanah di dalam kehidupan sehingga dapat meningkatkan kesadaran dalam menjaga, merawat, dan memanfaatkan tanah dengan sebaik-baiknya.

##### **2. Dampak Hukum**

Pelatihan manajemen pertanahan desa ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya konflik pertanahan sebagai bahan dalam menentukan kebijakan serta pengendalian pertanahan dan menumbuhkan sikap dan perilaku masyarakat yang mentaati dan mematuhi peraturan yang ada. Selain itu, masyarakat dapat menjaga dan memelihara tanahnya terutama mengenai batas bidang tanah sehingga tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Serta masyarakat yang belum mendaftarkan kepemilikan tanahnya diharapkan juga dapat lebih antusias untuk mendaftarkan tanahnya agar mendapat alat bukti kepemilikan yang sah

dan dapat menjamin kepastian hukum, sehingga dapat mewujudkan tertib administrasi pertanahan.

### **3. Dampak Teknis**

Dampak teknis dari pelatihan ini antara lain dapat mempercepat proses administrasi pertanahan, sehingga dapat tercipta pelayanan prima yang menyangkut mengenai pertanahan. Selain itu masyarakat dan aparat desa yang telah diberikan pelatihan juga diharapkan menjadi lebih paham mengenai proses administrasi tersebut, sehingga bisa memberikan contoh dan pengarahan yang baik kepada warga desa lainnya.

### **4. Dampak Ekonomi**

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dusun-dusun di Lereng Merapi karena dapat memanfaatkan potensi desa secara optimal yang dalam hal ini pelaksanaannya membuka peluang terlaksananya *ecotourism*. Peluang optimalisasi kondisi ekonomi yang menerapkan prinsip *ecotourism* ini bisa dilakukan secara berkelompok yang bermuara pada pilihan strategi *livelihood* masyarakat, baik yang berupa strategi *on-farm*, *off-farm*, dan *non-farm*. Contoh dampak ekonomi dengan prinsip *ecotourism* yang terjadi diantaranya masyarakat mulai menekuni berbagai jasa pariwisata seperti *Volcano Tour/Lava Tour* dengan menggunakan jeep wisata, usaha sapi perah, memandu para wisatawan yang berkunjung ke dusun mereka, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, masyarakat desa di Lereng Merapi dapat mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan potensinya sehingga dapat meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat.

## **E. Pelaksanaan Kegiatan**

### **1. Partisipan**

- a. Peserta Kegiatan:

Perangkat Desa Umbulharjo dan Kepuharjo serta Masyarakat Desa Umbulharjo (Dusun Pangukrejo dan Dusun Pelemsari) dan Kepuharjo (Dusun Petung, Dusun Kaliadem, Dusun Jambu, dan Dusun Kopeng).

b. Narasumber:

- 1) Kepala Seksi Penataan Pertanahan;
- 2) Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan;
- 3) Kepala Sub Seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu;
- 4) Kepala Desa Umbulharjo;
- 5) Kepala Desa Kepuharjo;
- 6) Kepala Dusun Pangukrejo, Dusun Pelemsari, Dusun Petung, Dusun Kaliadem, Dusun Jambu, dan Dusun Kopeng.

c. MC / Pembawa Acara: Aparat Desa Umbulharjo.

## **2. Jadwal dan Waktu Pelaksanaan**

Pelaksanaan Pelatihan Manajemen Pertanahan Desa di Lereng Merapi ini akan dilaksanakan pada:

Hari, Tgl : Kamis-Sabtu, 14-16 Maret 2019

Pukul : 08.00-selesai

Tempat : Balai Desa Umbulharjo dan Kepuharjo

Acara : Pelatihan Manajemen Pertanahan Desa di Lereng Merapi

## **3. Substansi Kegiatan**

a. Perencanaan

1) Penetapan Lokasi

Menetapkan Desa Umbulharjo sebagai lokasi yang akan dilakukan penyuluhan penguasaan dan pemilikan tanah berdasarkan kesepakatan antara 2 Desa (Umbulharjo dan Kepuharjo). Pelaksanaan penetapan lokasi dilaksanakan pada minggu akhir Bulan Februari 2019.

2) Perencanaan Anggaran Biaya (RAB)

Merencanakan anggaran biaya yang akan digunakan dalam kegiatan Pelatihan Manajemen Pertanahan Desa di Lereng Merapi. Pelaksanaannya perencanaan anggaran pada awal Bulan Maret 2019.

b. Persiapan

1) Penyiapan Tim Pelatihan Manajemen Pertanahan Desa

Membentuk Tim Pelatihan Manajemen Pertanahan Desa di Lereng Merapi yang dilaksanakan pada minggu keempat bulan Februari 2019.

2) Pra Pelatihan

Melakukan Pra Pelatihan Manajemen Pertanahan Desa di Lereng Merapi sesuai dengan hasil penetapan lokasi dengan melaksanakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh Tim Pelatihan Manajemen Pertanahan Desa. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada minggu pertama bulan Maret 2019.

3) Penyusunan Rencana Kegiatan Pelaksanaan

Melakukan penyusunan rencana kegiatan pelaksanaan penyuluhan. Kegiatan tersebut dilakukan pada minggu kedua bulan Maret 2019.

4) Koordinasi dengan pemerintahan Kecamatan dan Desa

Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan Cangkringan dan Desa Umbulharjo dan Kepuharjo, bahwa akan dilaksanakan Pelatihan Manajemen Pertanahan Desa di Lereng Merapi dengan terlebih dahulu mengirim surat pemberitahuan dan undangan. Pelaksanaannya pada minggu kedua bulan Maret 2019.

5) Penyiapan bahan dan alat

Mempersiapkan bahan dan alat yang akan digunakan pada saat penyuluhan. Pelaksanaannya pada minggu ketiga bulan Maret 2019.

c. Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Manajemen Pertanahan Desa di Lereng Merapi akan dilaksanakan sesuai jadwal, yakni 14-16 Maret 2019. Pada hari pertama pelaksanaan, diawali dengan pembukaan oleh Kepala Desa Umbulharjo dan Kepuharjo, kemudian dilanjutkan penyampaian materi oleh Kepala Seksi Penataan Pertanahan, Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan, serta Kepala Sub Seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu. Selanjutnya dilakukan break (istirahat) selama 15 menit dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab serta diskusi terbuka antara Narasumber dengan masyarakat. Pada sesi ini terjadi sesitanya jawab sekaligus tukar pendapat, sehingga masyarakat diharapkan bisa lebih memahami tentang kegiatan manajemen pertanahan termasuk kegiatan konsolidasi pertanahan yang akan dilaksanakan. 2 hari setelahnya dilaksanakan penyampaian materi pelatihan secara lebih dalam terkait manajemen pertanahan.

Pada tahap ini dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan pelatihan dengan berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Manajemen Pertanahan. Kegiatan pelaksanaan pelatihan tersebut meliputi:

- 1.) Pengumpulan data dari masyarakat kepada aparat desa serta pencatatan data pada formulir riwayat tanah oleh aparat desa. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi terkait riwayat tanah dengan cara mengisi formulir riwayat tanah secara manual. Data dimaksud adalah data yang berkaitan dengan penguasaan, kepemilikan, dan penggunaan tanah, dimana formulir riwayat tanah ini merupakan salah satu alat bukti tertulis untuk menunjukkan atas kepemilikan bidang tanah sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Sehingga apabila terjadi peralihan baik itu

dengan peristiwa dan perbuatan hukum maka riwayat tanah tersebut sudah tercatat di kantor desa setempat.

2.) Pengolahan data serta penyimpanan dan pembuatan basis data. Proses pengolahan data terdiri dari proses menginput data menjadi format digital serta penyimpanan data sekaligus pembuatan basis data riwayat tanah tersebut. Basis data adalah kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan diperangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Dengan terpenuhinya basis data yang baik, selain bertujuan untuk proses updating data pertanahan, hal tersebut juga akan memberikan kemudahan bagi aparat desa ataupun petugas kantor pertanahan dalam mengakses data apabila dikemudian hari data tersebut diperlukan.

#### d. Evaluasi

Evaluasi dalam hal ini bertujuan mengukur keberhasilan program pelatihan dalam segi hasil pelatihan partisipan dan kualitas penyelenggaraan program. Hasil pelatihan partisipaan dibuktikan dengan adanya perubahan pengetahuan, sikap, maupun keterampilan peserta / masyarakat desa, yang diperkirakan sebagai akibat dari pelatihan.

## **F. Exit Strategy**

Jalan keluar atau strategilain yang dipersiapkan untuk mengatasi kemungkinan terburuk yang bisa terjadi, diantaranya yaitu:

### **1. Bila Kegiatan Sulit Difahami Oleh Masyarakat**

Apabila kegiatan sulit dipahami maka akan dilakukan pendekatan kepada masyarakat desa di Lereng Merapidengan lebih persuasif lagi. Seperti memperbaiki segi penyampaian informasi dan komunikasi, agar penerima lebih mudah memahami materi yang akan disampaikan dengan melibatkan partisipasi penuh dari masyarakat secara interaktif. Selain itu porsi untuk sesi tanya jawab diperpanjang agar peserta dapat lebih



memahami materi yang disampaikan. Dalam proses tanya jawab pasti terdapat perbedaan pendapat dan diskusi. Perbedaan pendapat disampaikan dengan hormat dan penyelesaian perbedaan pendapat dapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat antara pihak yang berbeda pendapat hingga mencapai kesepakatan bersama.

## **2. Bila Kegiatan Sulit Dilaksanakan Oleh Masyarakat**

Bila kegiatan pelatihan ini sulit dilaksanakan, tim pelaksana pelatihan dapat merubah ataupun memodifikasi metode pelatihan yang dilakukan. Misalnya dengan menampilkan kegiatan-kegiatan serupa yang sudah pernah dilakukan, memaparkan keberhasilan yang dicapai sehingga dapat memotivasi peserta pelatihan untuk dapat mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Serta dengan menampilkan proses pelaksanaan pelatihan yang sebelumnya dengan dibantu dengan berbagai gambar, foto, maupun video yang menarik perhatian para peserta pelatihan.

## **3. Bila Kegiatan Sulit Diterima Oleh Masyarakat**

Jika kegiatan pelatihan ini sulit diterima oleh masyarakat maka jalan yang harus diambil atas permasalahan ini adalah dengan melakukan pendekatan secara persuasif, dengan memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai bagaimana hasil dan dampak kegiatan dari kegiatan pelatihan yang akan dilaksanakan. Kemudian juga dengan memberikan penjelasan mengenai dampak atas keberhasilan kegiatan pelatihan ini, ditambah dengan memberikan pemahaman yang luas akan pentingnya manajemen pertahanan yang baik di lingkungan desa, mengingat peluang usaha yang sedang berkembang pasca erupsi gunung merapi, seperti *ecotourism*, dsb. Jika tidak dimaksimalkan / dimanfaatkan dengan baik, maka tangan-tangan jahat di luar sana siap mengambil alih yang bukan hak mereka.

Diharapkan nantinya terjadinya komunikasi, dengan membangun hubungan yang simpatik dan bertukar pikiran dengan mengekspresikan gagasan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh tim pelatihan.

Selanjutnya proses ini ditujukan untuk membangun kemandirian baik individu maupun kolektif yang biasanya dilakukan melalui organisasi dan mendorong/memotivasi individu atau kolektif agar mempunyai kemampuan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Dari penjelasan di atas, kegiatan Pelatihan Manajemen Pertanahan Desa di Lereng Merapi merupakan salah satu upaya melakukan pendekatan partisipatif agar masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan belaka, tetapi menjadi subjek yang ikut menentukan keberhasilan sebuah program pembangunan yang dilaksanakan.

## **G. Monitoring dan Evaluasi**

### **1. Monitoring Kegiatan**

Kegiatan monitoring bertujuan untuk memantau suatu kegiatan agar tepat dalam sasaran. Kegiatan monitoring meliputi mekanisme monitoring, fokus monitoring, acuan monitoring, jadwal monitoring. Pelaksanaan monitoring dapat dilakukan dengan berbagai cara, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.

### **2. Evaluasi Kegiatan**

Evaluasi merupakan rangkuman hasil pengukuran capaian kinerja selama tahun berjalan, yang berkontribusi terhadap capaian *outcome* yang ditetapkan dalam rencana strategi pertanahan. Capaian kinerja output dan *outcome* diukur dengan menggunakan berbagai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana tersebut. Keseluruhan capaian kinerja merupakan ukuran keberhasilan manajemen program dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Evaluasi kinerja dimaksudkan untuk menelaah apakah capaian kinerja *output* serta capaian kinerja *outcome* kumulatif sesuai dengan yang direncanakan. Evaluasi capaian kinerja dilakukan antara lain dengan analisis membandingkan antara apa yang direncanakan dengan apa yang dihasilkan, disertai dengan tingkat capaian dalam ukuran kuantitatif yang tertera dalam penetapan indikator yang terdiri dari indikator input dan indikator output.

Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Kegiatan ini sangat penting dilaksanakan sebagai kontrol yang baik terhadap kegiatan yang sedang dijalankan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan selanjutnya.

#### **H. Cara Pelaporan**

Laporan hasil monitoring dan evaluasi secara lengkap disampaikan ketua tim monitoring dan evaluasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman kepada Kepala Desa Umbulharjo dan Desa Kepuharjo. Pelaporannya terkait dengan hasil evaluasi kegiatan dari tahapan kegiatan awal sampai dengan tahapan akhir. Kegiatan pelaporan ini terkait dengan anggaran atau biaya yang telah dikeluarkan.

#### **I. Kebutuhan Material**

Kegiatan pelatihan manajemen pertanahan ini membutuhkan media penunjang berupa laptop, printer, alat tulis, meja, kursi, proyektor, dan layarnya. Selain itu juga diberikan snack dan makan siang untuk peserta penyuluhan, narasumber, dan tim pelatihan. Untuk kegiatan monitoring dan evaluasinya dapat berupa laptop, printer, serta alat tulis.

#### **J. Rencana Anggaran Biaya**

Adapun sumber dana yang kami butuhkan adalah sebesar **Rp13.700.000,-** dimana dana tersebut berasal dari DIPA yang dibebankan pada anggaran Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	<b>Rapat Koordinasi</b>				
	ATK dan Undangan Rapat	1	Paket	700.000	700.000
	Konsumsi Rapat	10	orang	50.000	500.000
2.	<b>Kegiatan Pelatihan Manajemen Pertanahan</b>	3	Hari	(selama 3 hari)	
	Biaya Pembicara (Narasumber dan Tim Pelatihan)	6	orang	1.000.000	6.000.000
	ATK	1	Paket	1.000.000	1.000.000
	Konsumsi	60	Orang	75.000	4.500.000
3.	<b>Monitoring dan Evaluasi</b>	1	Hari		
	ATK	1	Paket	1.000.000	1.000.000
				<b>Total</b>	<b>13.700.000</b>

#### DAFTAR PUSTAKA

Aristiono Nugroho & Sutaryono. 2015. *Ecotourism* Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah. Yogyakarta: STPN Press.